

The Function Of Inspectors of BPJS on Employment in Implementation Government Regulations No.86/2013 and The Regulations of Minister of Manpower No.23/ 2016 Regarding Labor Rights (A Case Study on BPJS on Employment in the Special Capital Region of Jakarta)

Abstract

By

Sumiati¹ dan Ari Hernawan²

The objective of this thesis research is to identify what the function audit officer BPJS Employment in implementation Government Regulations No.86 Year 2013 and what efforts have been made audit officers in DKI Jakarta towards increasing compliance.

The method of this research that used is judicial-empiric, in which highlighting the primary data as basic and literature research as the secondary data or supporting data research. All datas were analyzed using qualitative method. The result of this study are presented in a report of descriptive analysis

Result obtained in this research is the implementation Government Regulation No.86/2013 not running as expected because sanction of fine is very small that is 0,1% so is not give rise to deterrent effect to employer. The inspectors always do the best for towards increasing compliance employer with cooperation between law enforcement institution beside make an effort supervision and examinations in accordance with the law.

Key words : Audit Officer BPJS Employment, administrative sanctions

¹ St. M Saun, Tanah Baru, Depok, West Java

² Lecturer of Law Faculty of Gadjah Mada University, Yogyakarta

Fungsi Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 23 Tahun 2016 Terkait dengan Hak-hak Tenaga Kerja (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Wilayah DKI Jakarta)

Intisari

Oleh

Sumiati¹ dan Ari Hernawan²

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apa fungsi petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2013 dan upaya apa saja yang dilakukan petugas pemeriksa di wilayah DKI Jakarta terhadap peningkatan kepatuhan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan data primer sebagai data pokok dan data sekunder atau data pendukung lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 belum berjalan maksimal dikarenakan sangat kecilnya sanksi denda yang diberikan yaitu 0,1% sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pemberi kerja. Petugas Pemeriksa terus berupaya secara maksimal untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dengan bekerjasama dengan instansi penegak hukum selain melakukan upaya pengawasan dan pemeriksaan sesuai amanah undang-undang.

Kata Kunci : Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan, Penerapan sanksi administrative,

¹ Tanah Baru, Jl M Saun, Depok Jawa Barat

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada